

ISSN 0251-286X

BULETIN PSP

Volume XVII. No. 1 April 2008



**Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor**

**FAKTOR PENENTU PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUKABUMI**
*(Improving Youth's Role in Fisheries and Marine Affair Development in
Sukabumi Regency)*

Oleh:

Adhyaksa Dault¹⁾ Rudi C. Tarumingkeng²⁾, Manuwoto²⁾, Victor P.H.
Nikijuluw³⁾, Tommy H. Purwaka³⁾, dan John Haluan⁴⁾.

Diterima tanggal : Juni 2007; Disetujui : 30 Februari 2008

ABSTRACT

Fisheries and marine affair development contributes to national income, employment, foreign exchange reserves, and remote islands development acceleration. Politically, fisheries and marine affair improvement is implementation of Indonesian development in term of a union country. Human resource is one of the main constraints in utilizing marine and fisheries resources optimally.

On general, the study is aimed at formulating policies in which youth's roles in fisheries and marine affair development get improved. Specifically, objectives of the study are: (1) to identify and to assess forms of youth's roles in fisheries and marine affair development; (2) to assess and to synthesize factors affecting youth's roles in fisheries and marine affair sector; (3) to determine policy variables affecting youth's roles in fisheries and marine affair development; and (4) to formulate public policy aimed at improving youth's roles in fisheries and marine affair development. This study was conducted in Sukabumi Regency and applied a structural equation modeling (SEM).

Types of youth's roles in fisheries and marine affair are planning, fisheries production, monitoring and evaluation of use of fisheries and marine resources, and fisheries institutions. Youth plays their role most in fisheries production, especially as the labor because it is relatively the simplest type of role they can implement. Other youth's roles, however, should be promoted continuously in order to make their overall roles more optimal. Expanding labor employment is the priority agenda of the government. In addition, the government has to boost the other types of youth's roles in terms of planning, monitoring and evaluation, and fisheries institutions.

¹ Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Email : adhy_dault@hotmail.com

² Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor.

³ Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

⁴ Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB

Factors affecting youth's roles in fisheries and marine affair development are public policy, youth entrepreneurship, social capital ownership, and resources possession. Among the most influencing variables of public policy are extension intensity and credit provision. The factors affecting youth's roles in fisheries and marine affair development are correlated each other. It indicates that public policy will be effective if it is implemented simultaneously with other policies.

Key words : *youth's roles, fisheries and marine affair, public policy, Sukabumi*

ABSTRAK

Pembangunan kelautan dan perikanan memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional, menyediakan dan menyerap lapangan kerja, menyumbangkan devisa, serta mempercepat dan mendorong pembangunan pulau-pulau terpencil. Secara politik, pembangunan kelautan dan perikanan merupakan wujud dari pembangunan negara Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Kendala sumberdaya manusia merupakan masalah utama dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan perikanan secara optimal.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rumusan kebijakan dimana peran pemuda dalam pembangunan kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan. Secara khusus, tujuan penelitian adalah : (1) Mengidentifikasi dan mengkaji bentuk-bentuk peran pemuda dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan; (2) Mengkaji dan mensintesa faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan; (3) Menentukan variabel kebijakan yang mempengaruhi peran pemuda dalam pembangunan kelautan dan perikanan; dan (4) Merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perikanan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan model persamaan struktural.

Bentuk peran pemuda dalam pembangunan perikanan dan kelautan adalah dalam hal perencanaan, produksi, monitoring dan evaluasi, dan lembaga perikanan. Peran pemuda paling banyak dalam hal produksi perikanan terutama sebagai tenaga kerja karena kegiatan ini relatif paling mudah dibanding peran dalam bentuk lainnya. Walaupun demikian peran pemuda dalam bentuk lainnya perlu terus ditingkatkan agar peran mereka secara keseluruhan bisa lebih optimal. Penyediaan lapangan kerja lebih luas memang merupakan prioritas, tetapi pemerintah juga perlu mendorong peran pemuda dalam hal perencanaan, monitoring dan evaluasi, maupun kelembagaan perikanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah kebijakan publik, kewirausahaan pemuda,

pemilikan kapital sosial, dan penguasaan sumberdaya. Variabel dalam kebijakan publik yang relatif paling berpengaruh adalah intensitas penyuluhan dan pemberian kredit. Terdapat korelasi antar faktor yang mempengaruhi peran pemuda dan mengindikasikan bahwa kebijakan publik akan bisa efektif jika didukung kebijakan yang terkait dengan faktor-faktor lainnya secara simultan.

Kata kunci : peran pemuda, kelautan dan perikanan, kebijakan publik, Sukabumi

1. PENDAHULUAN

Gejala menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pada sektor perikanan terjadi secara global. Nikijuluw (2005), misalnya, memberi contoh tentang turunnya jumlah orang muda yang kuat dan berprestasi yang menjadi nelayan di Jepang dan Korea. Karena bisnis menangkap ikan dinilai sebagai bisnis yang memiliki sifat *dangerous*, *dirty*, dan *desperate* maka orang muda berhenti menjadi nelayan atau tidak mau masuk bekerja pada usaha ini. Disebut *dangerous* karena memang menangkap ikan penuh bahaya yang mengancam keselamatan. Disebut *dirty* karena usaha ini memang bernuansa dekil, bau amis, diterjang sinar matahari, dan tidak seperti pekerjaan di kantor. Disebut *desperate* karena menjalankan bisnis ini mengandung makna nekat dan aneh karena hanya mereka yang demikianlah yang mau tinggal berhari-hari di laut.

Di tingkat nasional, minat generasi muda untuk bekerja pada usaha perikanan cenderung semakin berkurang, paling tidak dinilai dari kurangnya minat pemuda yang masuk sekolah kedinasan (kejuruan) perikanan. Bila dilihat dari alumni sekolah kejuruan perikanan, hanya sedikit yang ingin benar turun ke laut sebagai nelayan. Menurut Satria (2002), urbanisasi serta tersedia peluang kerja dan usaha di sektor lain adalah alasan kaum muda menurun minatnya pada pekerjaan sebagai nelayan.

Disamping kecenderungan jumlah generasi muda yang berkurang pada usaha perikanan, masalah lain yang dihadapi oleh industri perikanan Indonesia adalah kualitas sumberdaya manusia yang rendah, setidaknya dilihat dari tingkat pendidikan formal yang dijalani. Hanya tiga dari 10.000 orang nelayan yang pernah duduk di perguruan tinggi. Sementara, 79,50% nelayan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sekitar 17,39% tamat SD, 1,90% tamat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan 1,36% tamat Sekolah Lanjutan

Atas (SLTA). Dengan kondisi kualitas sumberdaya manusia nelayan seperti ini, disertai dengan kecenderungan nelayan usia tua yang tinggal di dalam usaha perikanan, maka bukanlah suatu upaya yang ringan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kinerja sektor perikanan.

2. TUJUAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui : (1) faktor penentu peran pemuda dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi, (2) dekomposisi faktor penentu peran pemuda, (3) korelasi antar faktor penentu peran pemuda, dan (4) bentuk-bentuk peran pemuda.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis data dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi pada bulan Maret hingga April 2006. Total responden sebanyak 390 orang dengan sebaran meliputi lima kecamatan, yaitu Cisolok (124 orang), Pelabuhan Ratu (179 orang), Ciemas (30 orang), Ciracap (28 orang), dan Surade (29 orang). Responden adalah pemuda berumur antara 18 hingga 35 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Data primer dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Metode survei yang digunakan adalah *complete enumeration*, yaitu semua pemuda di lokasi survei diwawancara dengan catatan responden tersebut bersedia diwawancara dan mempunyai pekerjaan yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Data yang diambil meliputi faktor kewirausahaan, kebijakan publik, sumberdaya, dan kapital sosial. Sedangkan bentuk-bentuk peran pemuda dikelompokkan menjadi empat aspek, yaitu perencanaan, produksi, monitoring dan evaluasi, dan lembaga perikanan. Secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda dan bentuk-bentuk peran pemuda diuraikan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda di Kabupaten Sukabumi, 2006

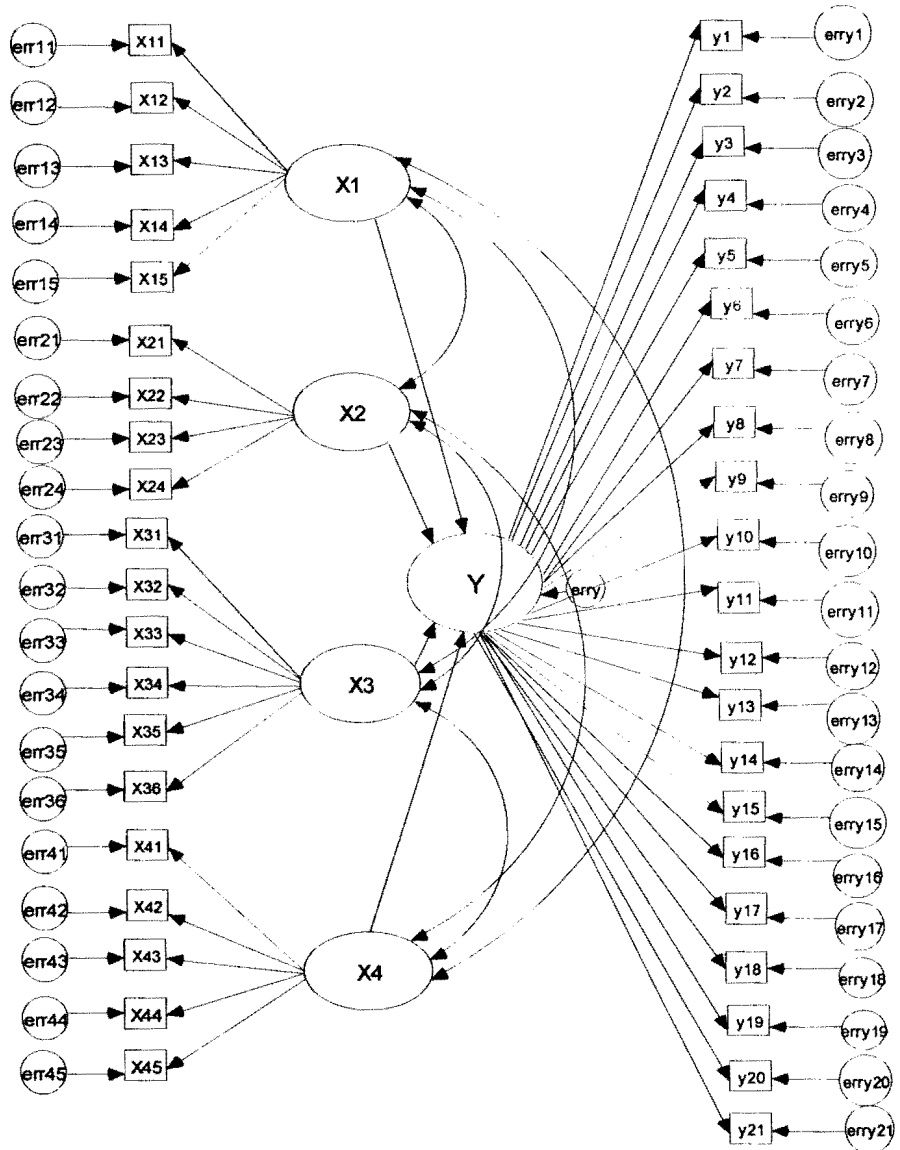
| Kode | Variabel | Satuan |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Kewiraswastaan | | |
| X ₁₁ | Usia | tahun |
| X ₁₂ | Pendidikan umum formal | tahun |
| X ₁₃ | Pengalaman berbisnis dalam bidang perikanan | tahun |
| X ₁₄ | Membaca berita bisnis | hari per bulan |
| X ₁₅ | Mendengar berita bisnis dari radio/TV | hari per bulan |
| 2. Kebijakan Publik | | |
| X ₂₁ | Nilai kredit/bantuan/modal bergulir yang diterima dari pemerintah | Rp |
| X ₂₂ | Nilai pungutan yang dibayar dalam setahun (ijin pajak, retribusi) | Rp/tahun |
| X ₂₃ | Intensitas penyuluhan yang dirasakan/dikuti (dalam setahun) | kali per tahun |
| X ₂₄ | Waktu yang diperlukan untuk memperoleh ijin usaha perikanan | hari |
| 3. Sumberdaya | | |
| X ₃₁ | Nilai aset usaha | Rp |
| X ₃₂ | Kepemilikan lahan non perikanan | Rp |
| X ₃₃ | Jumlah tenaga kerja produktif dalam keluarga | orang |
| X ₃₄ | Keuntungan usaha perikanan | Rp |
| X ₃₅ | Besarnya saldo tabungan saat ini | Rp |
| X ₃₆ | Perkiraan kenaikan keuntungan tahun depan dibanding tahun ini | persen |
| 4. Kapital Sosial | | |
| X ₄₁ | Nilai warisan dari orang tua | Rp |
| X ₄₂ | Kekayaan keluarga/orang tua | Rp |
| X ₄₃ | Lamanya mengikuti organisasi politik (underbow) | tahun |
| X ₄₄ | Lamanya menjadi anggota organisasi sosial keagamaan | tahun |
| X ₄₅ | Jumlah kolega/mitra bisnis yang masih aktif berhubungan | orang |

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Pemuda di Kabupaten Sukabumi, 2006

| Kode | Variabel | Ya = 1 | Tidak = 0 |
|---|--|--------|-----------|
| 1. Perencanaan | | | |
| Y ₁ | Ikut rapat desa/daerah tentang rencana program perikanan | | |
| Y ₂ | Memberikan saran atau gagasan dalam rapat | | |
| Y ₃ | Menyusun program pembangunan perikanan | | |
| Y ₄ | Sosialisasi program kepada masyarakat | | |
| 2. Produksi | | | |
| Y ₅ | Memiliki asset tangkap | | |
| Y ₆ | Memiliki lahan budidaya | | |
| Y ₇ | Memiliki asset pengolahan ikan | | |
| Y ₈ | Memiliki asset pemasaran ikan | | |
| Y ₉ | Bertindak sebagai manajer | | |
| Y ₁₀ | Menjadi tenaga kerja | | |
| Y ₁₁ | Menjual faktor input (sarana produksi) | | |
| Y ₁₂ | Menyiapkan layanan reparasi | | |
| 3. Monitoring dan Evaluasi Sumberdaya | | | |
| Y ₁₃ | Mencatat produksi/biaya usaha | | |
| Y ₁₄ | Melaporkan produksi/statistic perikanan kepada yang berwenang | | |
| Y ₁₅ | Melaporkan kepada yang berwenang jika ada pelanggaran | | |
| Y ₁₆ | Melaporkan kepada yang berwenang jika terjadi hal yang mengganggu produksi (hama/penyakit) | | |
| 4. Peran dalam Lembaga Perikanan (Y₄) | | | |
| Y ₁₇ | Anggota organisasi kelompok/koperasi perikanan | | |
| Y ₁₈ | Menjadi pengurus aktif kelompok/koperasi | | |
| Y ₁₉ | Mengikuti program pemerintah atas nama kelompok | | |
| Y ₂₀ | Anggota HNSI | | |
| Y ₂₁ | Pengurus HNSI | | |

3.2 Metode Analisis

Data dianalisis menggunakan model persamaan struktural atau *structural equation modelling* (SEM) menggunakan *software* versi 5.0. Model yang digunakan diklasifikasikan sebagai *second order full version*. Peran pemuda dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu kewirausahaan (X₁) terdiri dari variabel X₁₁ - X₁₅, kebijakan publik (X₂) terdiri dari variabel X₂₁ - X₂₄, sumberdaya (X₃) terdiri dari X₃₁-X₃₆, dan kapital sosial (X₄) terdiri dari X₄₁-45. Bentuk-bentuk peran pemuda diuraikan menjadi Y₁ - Y₂₁. Secara rinci metode analisis data diuraikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model peran pemuda di Kabupaten Sukabumi, 2006

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-Faktor Penentu Peran Pemuda

Hubungan antara aspek peran dengan peran secara kuantitatif ditampilkan pada Tabel 3. Aspek kebijakan publik memiliki pengaruh yang paling besar diikuti oleh kewirausahaan, kapital sosial, dan sumberdaya. Kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan, masih sangat signifikan dibanding aspek lainnya. Untuk itu kebijakan publik yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar peran serta pemuda semakin tinggi.

Kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah harus bisa mendorong aspek-aspek lainnya. Aspek kewirausahaan perlu didorong agar pemuda bisa berperan melalui sektor informal maupun formal. Secara informal antara lain melakukan kegiatan bisnis perikanan dalam skala kecil, baik dalam hal penangkapan, pengolahan, maupun pemasaran. Sedangkan secara formal pemuda bisa terdorong mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang perikanan secara resmi berbadan hukum atau bekerja pada perusahaan perikanan.

Khrisna (2001), melakukan survei di India meliputi 60 desa dengan menghubungkan berbagai variabel kapital sosial dengan kemiskinan rumah tangga. Variabel tersebut meliputi keanggotaan dalam kelompok tenaga kerja gotong royong, pengendalian hama penyakit, berbagi lahan garapan, solidaritas, dan hubungan timbal balik. Studi ini juga mempelajari variabel kemampuan individual, hubungan majikan-buruh, kasta, dewan desa, partai politik, dan hambatan menjadi pemimpin desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya melalui interaksi kapital sosial dan kemampuan individual maka kesejahteraan rumah tangga bisa ditingkatkan.

Lebih jauh lagi kebijakan publik juga diharapkan memberi iklim kondusif terhadap kapital sosial. Dengan kapital sosial yang kuat akan diperoleh daya tahan masyarakat yang kuat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kebijakan publik harus dibuat sedemikian rupa sehingga pemuda mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya secara optimal.

Tabel 3. Faktor-faktor penentu peran pemuda di Kabupaten Sukabumi Tahun 2006

| Faktor Penentu | Koefisien | Nilai t | Beda nyata |
|-----------------------------------|-----------|---------|------------|
| X ₁ (Kewiraswastaan) | 0,1769 | 20,102 | BN |
| X ₂ (Kebijakan Publik) | 0,2322 | 26,386 | BN |
| X ₃ (Sumberdaya) | 0,1570 | 17,841 | BN |
| X ₄ (Kapital Sosial) | 0,1663 | 18,898 | BN |

Catatan: BN (berbeda nyata), TBN (tidak berbeda nyata)

4.2 Dekomposisi faktor-faktor penentu peran pemuda

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran ditampilkan pada Tabel 4. Hasil pengujian dengan SEM menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam aspek kewirausahaan berdasarkan urutan pengaruhnya adalah membaca berita bisnis dari koran, mengikuti berita bisnis melalui siaran radio dan/atau televisi, usia, pendidikan, dan pengalaman bisnis di bidang perikanan. Kemauan membaca berita bisnis atau mengikuti siaran berita bisnis merupakan indikasi bahwa responden mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengetahui kegiatan bisnis secara umum yang pada taraf tertentu akan mempengaruhi bisnis yang sedang mereka kerjakan. Dalam hal ini pemuda yang rajin mengikuti berita bisnis lewat koran maupun radio/TV mempunyai motivasi yang lebih tinggi dibanding kelompok lain yang tidak mengikuti perkembangan bisnis. Orang yang mempunyai motivasi tinggi akan mendapatkan hasil (prestasi), afiliasi, kompetensi, dan kekuatan (Newstrom dan Davis, 1997).

Usia responden menunjukkan korelasi positif dengan aspek kewirausahaan. Dalam hal ini semakin tinggi usia responden, semakin tinggi jiwa wirausahanya. Hasil penelitian Dobrev (2004), di Amerika terhadap para lulusan program magister bidang administrasi bisnis menunjukkan bahwa hingga usia 31 tahun adalah masa yang paling kuat jiwa kewirausahaan mereka. Setelah usia 31 tahun jiwa wirasusaha masih bertambah hingga usia 43 tahun karena akumulasi pengetahuan dan pengalaman berbisnis di berbagai perusahaan. Menurut Battel (2006), petani yang lebih tua di Calhoun County, Michigan cenderung investasi pada teknologi (praktik) yang konservasi lingkungan (program pemerintah,

berupa penukaran pupuk kandang yang sudah digunakan). Selanjutnya Benjumea (2002), menyatakan bahwa generasi muda (suatu kelompok) tertentu harus menghormati kelompok yang lain. Karena pemuda berasal dari latar belakang yang berbeda, hal ini harus merupakan kontribusi untuk membangun suatu masyarakat. Pemuda patut mengembangkan kesetiakawanan melampaui batas-batas lingkungannya karena nilai-nilai yang berasal dari cinta kasih dan kesetiakawanan dapat menyelamatkan pemuda di tengah konflik sosial politik yang begitu banyak. Keragaman di antara pemuda menambahkan kekayaan terhadap semua proses, meskipun sulit mencapai konsensus.

Pendidikan juga mempengaruhi kewirausahaan seseorang. Pendidikan, baik yang formal, non-formal, dan informal, tidak diragukan lagi merupakan cara yang efektif untuk membentuk sikap, nilai, perilaku, dan keahlian yang secara efektif akan memungkinkan integrasi ke dalam masyarakat global. CEUE (2006) menyatakan pentingnya pendidikan untuk memupuk kewirausahaan pemuda. Lembaga ini juga mengaharapkan supaya pemuda mempunyai kesadaran bahwa wirausaha adalah pilihan pekerjaan pada masa depan. Program kewirausahaan akan diajarkan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Keterampilan yang diperoleh secara formal maupun informal (kursus), misalnya keterampilan komputer sangat bermanfaat bagi pemuda. Keterampilan komputer di Pennsylvania, misalnya, sangat penting dan signifikan dalam melakukan tugas manajemen usaha tani. Karena itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan komputer untuk keberhasilan usaha tani dan pembangunan pedesaan di masa yang akan datang (Brasier, Hyde, Stup, dan Holde, 2006).

Pada aspek kebijakan publik, penyuluhan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding nilai kredit yang diterima responden. Penyuluhan bisa memotivasi responden untuk mengikuti program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Semakin banyak menjangkau pemuda sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan semakin dampaknya terhadap peran pembangunan kelautan dan perikanan. Di sisi lain, pemberian kredit bisa mendorong pemuda untuk melakukan kegiatan yang memerlukan modal yang tidak mudah diperoleh melalui bank karena berbagai persyaratan. Rivera dan Qamar (2003), menyatakan bahwa penyuluhan saat ini selain dilaksanakan oleh pegawai pemerintah, bisa juga dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang

bersifat nirlaba maupun perusahaan yang mencari keuntungan. Penyuluhan dilakukan untuk melayani kebutuhan publik dan termasuk untuk tujuan ketahanan pangan. Kegiatan penyuluhan masa kini harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, seperti pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan, yang dampaknya sangat besar bagi masyarakat lokal. Penyuluhan memerlukan visi dan strategi yang bersifat nasional, baik pelaksanaannya secara terpusat, otonomi, maupun dilakukan oleh LSM dan perusahaan. Pelaksanaan penyuluhan juga harus sistematis, terkoordinasi, dan siap menghadapi perubahan.

Jumlah kredit yang lebih besar dan lebih tepat sasaran akan berdampak baik terhadap peran serta pemuda. Kredit bisa dikatakan sebagai tulang punggung dan mesin perekonomian. Dengan tersedianya kredit memungkinkan perorangan maupun perusahaan untuk meminjam modal berdasarkan kepercayaan dan membayarnya kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kredit dikatakan lancar jika debitur bisa mengembalikan pinjaman sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan berhasil. Kredit bermasalah jika pengembalian tidak sesuai yang dijadwalkan (Smith, 2004).

Tabel 4. Dekomposisi faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda di Kabupaten Sukabumi, 2006

| No. | Faktor yang mempengaruhi peran pemuda | Koefisien | Nilai t | Beda nyata |
|--|---------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 1. Kewiraswastaan (X₁) | | | | |
| 1. | Usia | 0,2956 | 33,591 | BN |
| 2. | Pendidikan | 0,2918 | 33,159 | BN |
| 3. | Pengalaman bisnis | 0,2791 | 31,716 | BN |
| 4. | Membaca berita | 0,2975 | 33,807 | BN |
| 5. | Mendengar berita | 0,2966 | 33,705 | BN |
| 2. Kebijakan Publik (X₂) | | | | |
| 6. | Kredit | 0,3793 | 43,102 | BN |
| 7. | Pajak yang dibayar | - | - | TBN |
| 8. | Penyuluhan | 0,3895 | 44,261 | BN |
| 9. | Waktu untuk ijin | - | - | TBN |

Tabel 4. Lanjutan

| 3. Sumberdaya (X ₃) | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----|
| 10. | Aset usaha | 0,2498 | 28,386 | BN |
| 11. | Lahan non-perikanan | 0,2589 | 29,420 | BN |
| 12. | Tenaga kerja | 0,2577 | 29,284 | BN |
| 13. | Keuntungan bisnis perikanan | | | TBN |
| 14. | Saldo Tabungan | 0,2591 | 29,443 | BN |
| 15. | Kenaikan keuntungan | 0,2541 | 28,875 | BN |
| 4. Kapital Sosial (X ₄) | | | | |
| 16. | Nilai warisan dari orang tua | - | - | TBN |
| 17. | Kekayaan keluarga | 0,2636 | 29,955 | BN |
| 18. | Orsospol | 0,2701 | 30,693 | BN |
| 19. | Organisasi agama | 0,2636 | 29,955 | BN |
| 20. | Mitra bisnis | 0,2752 | 31,273 | BN |

Catatan: BN (berbeda nyata), TBN (tidak berbeda nyata)

Penyusunan suatu kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Keterbukaan (transparansi) atas berbagai proses pengambilan keputusan akan mendorong peran masyarakat dan membuat para penyusun kebijakan publik menjadi bertanggung jawab (*accountable*) kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik. Transparansi adalah sebuah kondisi minimum bagi peran masyarakat dan merupakan awal dari terwujudnya akuntabilitas. Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari suatu kebijakan publik harus turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat menikmati faedah kebijakan publik tersebut bukan semata-mata dari hasil (produk) kebijakan tersebut, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. Prinsip partisipatif dalam penyusunan kebijakan publik membantu terselenggaranya proses perumusan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, dan memudahkan penentuan prioritas (transparansi). Prinsip akuntabilitas publik menuntut kapasitas para aparat publik untuk dapat membuktikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil ditujukan untuk kepentingan publik, dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* dengan indikator kinerja dan target yang jelas (Bappenas, 2006).

Penyuluhan merupakan faktor penting dalam kebijakan publik, dari hasil rekomendasi yang dapat disimpulkan dari hasil diskusi yang berkembang dalam pemaparan kegiatan ini, yaitu : (i) Penyuluhan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib memenuhinya, karena tak ada program pembangunan yang tidak didukung dengan penyuluhan, termasuk program pembangunan di bidang kelautan dan perikanan; (ii) Penyelenggaraan penyuluhan perikanan hendaknya terkoordinasi dan terintegrasi mulai dari pusat sampai dengan di daerah sehingga faktor penghambat dalam penyelenggaraannya dapat diperkecil; (iii) Komponen untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyuluh, merupakan sasaran antara kepentingan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dalam mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi dan teknologi; (iv) Perlu penataan kelembagaan dan tata penyelenggaraan penyuluhan perikanan sehingga dapat mempercepat peningkatan kompetensi tenaga penyuluh, sistem kerja yang intensif dan pengembangan kariernya. Perlu dibentuk forum/wadah bersama setiap daerah kabupaten/kota yang anggotanya antara lain terdiri dari kelompok masyarakat, para pakar, pengusaha dan aparat pemerintah untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan penyuluhan di daerah serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan perikanan (DKP, 2006). Disamping itu, menurut Benaboud (2006), tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam merespon kebijakan publik. Keefektifan hak perempuan tidak tergantung pada aturan atau regulasi resmi tetapi pada bagaimana perempuan mempraktekkan dan mengimplementasi secara aktual hak-haknya di lapangan.

Pada aspek sumberdaya, jumlah saldo tabungan yang dimiliki responden mempunyai pengaruh yang paling kuat dibanding faktor-faktor lainnya. Pengaruh faktor lainnya berdasarkan besarnya pengaruh adalah pemilikan lahan non perikanan, jumlah tenaga kerja keluarga produktif, perkiraan kenaikan keuntungan tahun depan, dan nilai aset usaha. Banyaknya saldo tabungan merupakan salah satu indikasi bahwa bisnis perikanan yang ditekuni memberikan penghasilan lebih sehingga bisa ditabung.

Dalam aspek kapital sosial, jumlah mitra bisnis mempunyai pengaruh paling kuat. Selanjutnya diikuti oleh faktor keikutsertaan dalam organisasi sosial politik, keterlibatan dalam organisasi keagamaan, dan kekayaan

keluarga. Dalam hal ini tampak bahwa banyaknya mitra bisnis yang dimiliki responden menunjukkan kesungguhan dalam menekuni bisnis perikanan. Semakin banyak mitra bisnis akan menambah jaringan usaha dan memperluas wawasan.

4.3 Korelasi antar aspek yang mempengaruhi peran pemuda

Antar aspek yang mempengaruhi peran pemuda terdapat korelasi (Tabel 5). Dalam hal ini korelasi yang paling kuat adalah hubungan antara aspek kewirausahaan dengan sumberdaya. Selanjutnya terdapat korelasi antara aspek kapital sosial dan kewirausahaan, kebijakan publik dan sumberdaya, serta kewirausahaan dan kebijakan publik. Tidak terdapat korelasi antara kebijakan publik dan kapital sosial serta sumberdaya dan kapital sosial.

Tabel 5. Korelasi antar faktor yang mempengaruhi peran pemuda di Kabupaten Sukabumi Tahun 2006

| Faktor Penentu | X ₁ (Kewirausahaan) | X ₂ (Kebijakan Publik) | X ₃ (Sumberdaya) | X ₄ (Kapital Sosial) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| X ₁ Kewirausahaan) | 1,0000 | 0,3716 | 0,5496 | 0,5188 |
| X ₂ (Kebijakan Publik) | 0,3716 | 1,0000 | 0,4187 | TBN |
| X ₃ (Sumberdaya) | 0,5496 | 0,4187 | 1,0000 | TBN |
| X ₄ (Kapital Sosial) | 0,5188 | TBN | TBN | 1,0000 |

Catatan: TBN (tidak berbeda nyata)

4.4. Bentuk-bentuk peran pemuda

Bentuk-bentuk peran pemuda yang penting disajikan pada Tabel 6. Peran masyarakat berbeda-beda sesuai dengan tahapan. Sebagian terlibat dalam identifikasi atau perencanaan. Sebagian lagi terlibat dalam tahap implementasi. Sementara itu ada juga yang terlibat pada tahap monitoring dan evaluasi. Perlu dicatat bahwa mendidik dan melatih masyarakat dapat berperan penting dalam meningkatkan peran mereka (BOBP, 1990).

Bentuk-bentuk peran pemuda yang paling penting dalam penelitian ini adalah memberikan saran dalam rapat di desa/daerah, sosialisasi program, mengikuti rapat, dan menyusun program. Keempat faktor

tersebut termasuk dalam kelompok perencanaan. Dalam suatu organisasi atau kelompok, perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan memilih cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa perencanaan akan sangat sulit bagi pemimpin untuk mengarahkan anggotanya dan mengelola sumberdaya secara efektif. Tanpa perencanaan juga sulit bagi pemimpin untuk mengelola kegiatan dengan percaya diri. Disamping itu tanpa perencanaan akan sangat kecil peluangnya bagi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Ada dua jenis perencanaan dalam suatu organisasi, yaitu: (i) perencanaan strategis yang dirancang oleh pimpinan kelompok yang menguraikan tujuan organisasi secara umum, dan (ii) perencanaan operasional yang berisi tentang rincian kegiatan sehari-hari dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan pihak-pihak di luar kelompok. Sedangkan perencanaan operasional berhubungan dengan sesama anggota di dalam kelompok (Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr., 2001). Hal ini merupakan indikasi bahwa pemuda akan terlibat lebih jauh dalam program-program pembangunan kelautan dan perikanan jika terlibat sejak dari perencanaan, apalagi jika program yang direncanakan berjalan dengan baik maka akan menarik minat pemuda untuk berperan.

Tabel 6. Hasil analisis bentuk-bentuk peran pemuda di Kabupaten Sukabumi, 2006

| No. | Bentuk Peran | Koefisien | Nilai t | Beda nyata |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|------------|
| 1. Perencanaan | | | | |
| 1. | Mengikuti rapat | 0,3497 | 39,739 | BN |
| 2. | Memberi saran dalam rapat | 0,3565 | 40,511 | BN |
| 3. | Menyusun program | 0,3457 | 39,284 | BN |
| 4. | Melakukan sosialisasi | 0,3529 | 40,102 | BN |
| 2. Produksi | | | | |
| 5. | Memiliki aset tangkap | 0,3235 | 36,761 | BN |
| 6. | Memiliki lahan budidaya | - | - | TBN |
| 7. | Menjadi manajer usaha | 0,3368 | 38,273 | BN |
| 8. | Melakukan pengolahan ikan | 0,3343 | 37,989 | BN |
| 9. | Memiliki aset pemasaran | 0,3302 | 37,523 | BN |
| 10. | Menjadi tenaga kerja | 0,3093 | 35,148 | BN |
| 11. | Menjual sarana produksi | 0,3294 | 37,432 | BN |
| 12. | Menyiapkan layanan reparasi | 0,3188 | 36,227 | BN |

Tabel 6. Lanjutan

| 3. Monitoring dan evaluasi sumberdaya | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--------|-----|
| 13. | Melaporkan biaya produksi | 0,3375 | 38,352 | BN |
| 14. | Melaporkan data produksi | - | - | TBN |
| 15. | Melaporkan jika ada pelanggaran | 0,3199 | 36,352 | BN |
| 16. | Melaporkan hama/penyakit | 0,3276 | 37,227 | BN |
| 4. Lembaga perikanan | | | | |
| 17. | Menjadi anggota kelompok | 0,3290 | 37,386 | BN |
| 18. | Menjadi pengurus kelompok | 0,3296 | 37,455 | BN |
| 19. | Mengikuti program ke luar daerah | 0,3448 | 39,182 | BN |
| 20. | Menjadi anggota HNSI | 0,3238 | 8,681 | BN |
| 21. | Menjadi pengurus HNSI | - | - | TBN |

Catatan: BN (berbeda nyata), TBN (tidak berbeda nyata)

Bentuk peran berikutnya yang penting adalah mengikuti program mewakili kelompok untuk kegiatan di luar daerah. Umumnya kegiatan tersebut terkait dengan pengenalan teknologi baru atau dinamika kelompok yang bisa mendorong mereka berusaha di bidang kelautan dan perikanan secara lebih baik. Kegiatan ini bisa menambah wawasan atau pengalaman anggota yang mewakili kelompoknya. Tambahan pengalaman yang diperoleh anggota melalui mengikuti program (semacam studi banding) ke luar daerah akan bermanfaat bukan hanya bagi anggota itu sendiri. Jika peserta studi banding tersebut diwajibkan membagi pengalamannya kepada anggota-anggota lainnya maka akan diperoleh sinergi yang sangat memadai demi kemajuan kelompok. Pengalaman di berbagai negara, seperti Malaysia dan Filipina, menunjukkan bahwa pengalaman anggota sangat membantu kesuksesan kelompok (Pollnac, 1988).

Selanjutnya adalah peran pemuda dengan melaporkan volume produksi dan biaya produksi. Jika pemuda dengan kesadaran sendiri bersedia melaporkan volume produksi dan biaya produksi menunjukkan partisipasi yang relatif tinggi. Hal ini juga akan mempermudah pencatatan statistik perikanan. Menurut BOBP (1990), peran semacam ini termasuk

peran serta tingkat kelima dari tujuh tingkat peran dalam pembangunan sektor perikanan.

Sedangkan manajer adalah urutan berikutnya yang berarti disamping memiliki keahlian memadai juga keberanian dan modal dalam menggeluti sektor kelautan dan perikanan. Seorang manajer atau pengelola suatu kegiatan bisnis umumnya memiliki kemampuan lebih dibandingkan para pegawai yang dikoordinirnya. Tugas manajer antara lain menciptakan tujuan dan menjaga konsistensinya, mengurangi ketergantungan inspeksi massal atau secara besar-besaran, secara terus menerus memperbaiki sistem produksi dan pelayanan, memberikan pelatihan kerja secara moderen, menghilangkan hambatan diantara para karyawannya, dan mampu melakukan transformasi (Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr., 2001).

Pengolahan ikan dan pemasaran ikan adalah bentuk peran berikutnya. Kedua kegiatan tersebut, yang merupakan tahapan dalam rantai agribisnis, memerlukan ketekunan maupun kreativitas dan merupakan proses yang mampu menciptakan nilai tambah. Konsep agribisnis semula diperkenalkan oleh John Davis dan Ray Goldberg pada tahun 1957 (HBS Staff, 2001). Agribisnis merupakan rangkaian kegiatan dalam memproduksi dan mendistribusikan sarana produksi pertanian, proses produksi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran produk pertanian. Dalam hal ini produk pertanian meliputi produk tanaman, ternak, dan ikan. Dalam rantai agribisnis terdapat empat kelompok, yaitu suplai sarana produksi termasuk penyediaan modal, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Produsen, dalam hal ini nelayan, bisa mendapat nilai tambah yang lebih tinggi jika produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan secara langsung. Pengolahan menjadi produk lain berbasis ikan, maupun pemasaran yang lebih tepat sasaran konsumennya akan memberi keuntungan yang relatif lebih memadai.

Menjadi pengurus kelompok merupakan contoh peran selanjutnya. Pemuda yang bersedia menjadi pengurus kelompok umumnya memiliki kemampuan atau keahlian (*expertise*) yang lebih baik dibanding yang lainnya. Pollnack (1988), melaporkan bahwa kemampuan manajemen yang baik oleh pengurus kelompok menjadi kunci keberhasilan kelompok nelayan di berbagai negara, seperti di Malaysia dan Grenada, sedangkan

kemampuan manajemen yang rendah membuat kelompok kurang baik kinerjanya, misalnya di Filipina.

Selanjutnya bentuk peran yang mempengaruhi peran serta pemuda adalah menjual sarana produksi. Kegiatan ini sangat mendukung dari sisi produksi perikanan tangkap. Sarana produksi yang dijual adalah berbagai peralatan tangkap termasuk suku cadang perahu. Penjualan sarana produksi sangat bermanfaat dalam rantai agribisnis perikanan terutama dari sisi suplai input. Pemerintah secara khusus tidak perlu menyediakan sarana produksi, tetapi mekanisme pasar sudah relatif berkembang dalam hal pasar sarana produksi untuk perikanan tangkap. Mankiw (2004), mengungkapkan bahwa sistem perekonomian yang relatif banyak digerakkan oleh pasar biasanya lebih efisien dibanding yang banyak campur tangan pemerintah. Kondisi ini perlu terus didukung agar tetap kondusif dimana penjual sarana produksi bisa memperoleh keuntungan wajar dan juga menciptakan lapangan kerja. Di pihak lain, pembeli sarana produksi (nelayan) bisa memperoleh barang yang diperlukan dalam harga yang terjangkau.

Menjadi anggota kelompok perikanan juga merupakan bentuk peran pemuda. Kelompok perikanan biasanya berupa kelompok informal yang dibentuk secara lokal oleh para pemuda. Sebagian lagi berupa koperasi, walaupun umumnya tidak berbadan hukum. Pangalaman kelompok perikanan di Teluk Cenderawasih, Irian Jaya (Sembiring, 1992), menunjukkan bahwa ada dua jenis anggota. Anggota penuh adalah yang membayar iuran bulanan, sedangkan calon anggota adalah yang tidak membayar iuran bulanan. Kedua jenis anggota tersebut mempunyai persamaan dalam kelompok perikanan tersebut, yaitu harapan bahwa mereka mendapat manfaat yang sulit diperoleh dari pihak lain khususnya kredit motorisasi untuk perahu tangkap mereka. Nelayan akan tetap mempertahankan keanggotaannya dalam kelompok perikanan jika mereka mendapatkan manfaat yang memadai. Menurut Krisnamurthi (2001), terdapat beberapa alasan masyarakat untuk bergabung dalam suatu koperasi. Pertama, koperasi menjalankan suatu kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi anggota. Kedua, koperasi memberikan manfaat lebih dibandingkan lembaga lainnya. Misalnya, kemudahan dan keringanan kredit bagi anggota kerasi. Ketiga, koperasi adalah organisasi yang dimiliki anggotanya sehingga koperasi bisa bertahan melewati masa-masa sulit dimana para anggotanya tetap setia mempertahankan usaha tersebut.

Walaupun demikian terdapat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang ditinggalakan oleh anggotanya. Penyebab hal tersebut adalah KUD tidak bisa memberikan layanan sesuai yang dijanjikan. Disamping itu pengurus KUD juga banyak melakukan penyimpangan serta tidak ada sanksi yang tegas dari pihak berwenang.

Melaporkan jika ditemukan hama/penyakit juga merupakan bentuk nyata peran. Kegiatan ini terutama untuk perikanan budidaya dimana hama/penyakit biasa dijumpai. Peran semacam ini merupakan bentuk monitoring yang dilakukan oleh pemuda nelayan. Pihak yang terkait, misalnya Dinas Perikanan setempat, akan menjadi lebih mudah menangani masalah hama dan penyakit jika masyarakat secara proaktif memberikan laporan.

Menjadi anggota HNSI merupakan bentuk peran dalam organisasi sosial. Dengan aktif menjadi anggota HNSI pemuda berharap bisa mencapai kepentingan bersama sebagai nelayan, yaitu memperoleh penghasilan yang memadai dari profesi yang digelutinya. Organisasi sosial bisa digunakan oleh para anggotanya sebagai upaya mengakumulasikan basis kekuasaan sosial (Suharto, 2003).

Pemilikan aset untuk penangkapan ikan adalah bentuk peran para pemuda yang memiliki modal memadai. Dalam hal ini peran mereka dalam agribisnis perikanan merupakan bagian dari sisi suplai sarana produksi. Jumlah aset tangkap yang dimiliki disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja (ABK), potensi ikan yang bisa ditangkap, serta pemasaran hasil tangkapan.

Melaporkan pelanggaran yang terjadi di laut juga dilakukan oleh para responden. Peran serta ini sangat bermanfaat bagi penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan yang berlaku. Rasa aman para nelayan akan lebih terjamin jika peraturan yang berlaku ditegakkan (*law enforcement*). Tindakan hukum yang tegas dari penegak hukum merupakan salah bentuk pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2003).

Layanan reparasi kapal/perahu maupun peralatan tangkap juga dilakukan oleh sebagian pemuda. Pelayanan jasa reparasi ini memperlancar kegiatan penangkapan ikan. Aktivitas penangkapan yang relatif intensif memerlukan perawatan yang juga intensif. Peluang ini ditangkap secara

baik oleh masyarakat setempat yang ternyata bisa menciptakan lapangan kerja di luar penangkapan ikan.

Menjadi tenaga kerja merupakan bentuk peran yang pengaruhnya paling rendah. Cara partisipasi dengan menjadi tenaga kerja adalah yang paling mudah selama ada pihak lain yang bersedia mempekerjakan responden sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki, maka yang bersangkutan bisa menjadi tenaga kerja. Walaupun pengaruhnya terhadap peran paling rendah, tetapi bukan berarti menjadi tenaga kerja tidak mempunyai peran signifikan. Yang perlu didorong adalah pihak-pihak tertentu, baik swasta maupun pemerintah, mampu menyediakan lapangan kerja bagi para pemuda.

5. KESIMPULAN

Faktor-faktor penentu atau determinan yang mempengaruhi peran pemuda adalah aspek kebijakan publik, kewirausahaan, sumberdaya, dan kapital sosial. Pengaruh aspek kebijakan publik adalah paling kuat, diikuti oleh kewirausahaan, kapital sosial, dan sumberdaya. Dengan demikian kebijakan publik sangat berperan untuk mendorong pemuda berperan lebih aktif dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Walaupun demikian, aspek kewirausahaan, kapital sosial dan sumberdaya juga perlu mendapatkan perhatian yang memadai.

Sebagian besar variabel kebijakan berpengaruh positif terhadap peran pemuda. Dari aspek kebijakan publik, variabel kebijakan yang berpengaruh adalah intensitas penyuluhan, dan nilai kredit perikanan yang diterima responden. Variabel kebijakan dari aspek kewirausahaan meliputi membaca berita, mendengar berita, usia, pendidikan, dan pengalaman berbisnis. Dalam aspek kapital sosial variabel yang mempengaruhi adalah jumlah mitra bisnis, keikutsertaan dalam organisasi politik, keterlibatan dalam organisasi agama, dan kekayaan keluarga. Sedangkan variabel kebijakan dari aspek sumberdaya adalah saldo tabungan, nilai lahan untuk usaha non-perikanan, jumlah tenaga kerja produktif, perkiraan keuntungan tahun depan, dan nilai aset usaha.

Terdapat korelasi antar aspek yang mempengaruhi faktor pemuda, yaitu kebijakan publik, kewirausahaan, kapital sosial, dan sumberdaya,

mengindikasikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah hanya akan efektif jika aspek-aspek lainnya juga diperhatikan. Harus ada upaya memperkuat aspek kewirausahaan, kapital sosial, dan sumberdaya agar kebijakan publik untuk mendorong peran pemuda bisa lebih berdaya guna. Pemberian kredit usaha atau bantuan serta penyuluhan yang merupakan variabel kebijakan publik perlu mendapat perhatian lebih baik.

Bentuk-bentuk peran pemuda dikelompokkan dalam hal perencanaan, produksi, monitoring dan evaluasi, dan lembaga perikanan. Pemuda berperan dalam (i) aspek perencanaan meliputi; mengikuti rapat di tingkat desa/daerah, memberi saran dalam rapat, menyusun program, dan sosialisasi program; (ii) aspek produksi yang terdiri dari : memiliki aset penangkapan ikan, aset pengolahan ikan, aset pemasaran ikan, bertindak sebagai manajer usaha, menjadi tenaga kerja, menjual sarana produksi, dan menyiapkan layanan reparasi; (iii) aspek monitoring dan evaluasi yang meliputi; mencatat produksi dan biaya produksi, melaporkan kepada yang berwenang jika terjadi pelanggaran, dan melaporkan jika ada gangguan hama dan penyakit; dan (iv) aspek lembaga perikanan, yaitu menjadi anggota kelompok/koperasi perikanan, menjadi pengurus kelompok perikanan, mengikuti program pemerintah mewakili kelompok, dan menjadi anggota HNSI. Peran pemuda paling banyak adalah sebagai pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Peran pemuda umumnya berhubungan dengan minat, kemampuan dan manfaat yang diperoleh. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja bagi pemuda terutama di bidang produksi, baik bersifat primer maupun penangkapan dan sekunder atau pengolahan produk perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). 2006. Good Public Governance. www.goodgovernance-bappenas.go.id/sekretariat.htm
- Battel, R. 2006. Farmer Willingness to Enter into Manure Exchange Agreements: Differences Based on Age and Farm Size. *Joernal of Extension*, 44(3). Article Number 3R1B4. www.joe.org/joe/2006june/rb4
- Benaboud, F. 2006. Women: Agents of Change. *The Interdependent*, 124: 3.
- Benjumea, A. 2002. Youth Network of Medellin. p.49-52 in in Golombek. S. 2002 (Ed). *What Works in Youth Participation: Case Studies From Around the World*. International Youth Foundation. 72 p.
- BOBP (Bay of Bengal Programme). 1990. *Helping Fisherfolk to Help Themselves: A Study in People's Participation*. Affiliated East-West Press (P) Ltd. Madrras, India. 185 pp.
- Brasier, K. J., Hyde, Stup R. E., Holden, L.A. 2006. Farm-Level Human Resource Management. An Opportunity for Extension. *Joernal of Extension*, 44(3). Article Number 3RIB3. www.joe.org/joe/2006june/rb3
- CEUE (Conference Entrepreneurship Education in Europe). 2006. *Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning*. Oslo, 26-27 October 2006.
- DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan). 2006. *Workshop Penyuluhan Perikanan*. 30 Agustus 2006.
- Dobrev, S. D. 2004. *Entrepreneurs : Will They Stay or Will They Go? Understanding Entrepreneurship Requires a Look at Both Context and Individual*. <http://www.uchicago.edu/news/capideas/may04/organizationalroles.html>
- HBS Staff. 2001. *Ray Goldberg, A Concept of Agribusiness*. Harvard Business School. *Working Knowledge for Business Leaders*. July 2, 2001.

- Krishna, A. 2001. Moving from the Stock of Social Capital to the Flow of Benefits : The Role of Agency. *World Development* 29 (6) : 925-943
- Krisnamurthi, B. 2002. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun I No. 4*
- Mankiw, G. N. 2004. *Principles of Economics. Third Edition.* Thompson South-Western, Singapore.
- Newstrom, J.W. and Davis K. 1997. *Organizational Behavior: Human Behavior at Work. Tenth Edition.* McGraw-Hill Companies, Inc. International Edition. New York. 611pp.
- Nikijuluw, V. P. H. 2005. *Politik Ekonomi Perikanan, Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan.* Ferry Agung Corporation, Jakarta. 314 hal.
- Pollnac, R. B. 1988. *Evaluating the Potential Fishermen's Organizations in Developing Countries.* International Center for Marine Resource Development. The University of Rhode Island Kingston. 79 pp.
- Rivera, W. M., and Qamar M. K. 2003. *A New Extension Vision for Food Security: Challenge to Change.* Sustainable Development Department. Food and Agriculture Organization. Rome. 23 pp.
- Satria, A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir.* PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta. 130 hal.
- Smith, S. C. 2004. *Understanding the Function of Credit.* <http://www-annual-credit-report.net/44304.php>
- Stoner, J. A. F., Freeman R.E., and Gilbert Jr. D. R. 2001. *Management. Sixth Edition.* Prentice Hall International Editions. Singapore. 630 pp.
- Suharto, E. 2003. *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi.* Open Society Institute, Central European University Budapest, Hungary.